

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh organisasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar (DPMPTSP) berdirinya berdasarkan PERDA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.

Sebelum berdirinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Banjar ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKMPPT) Kabupaten Banjar yang dibentuk berdasarkan pada PERDA Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan sebelum BKMPPT Kabupaten Banjar ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Dengan berkembangnya keorganisasian maka yang dulu Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKMPPT) menjadi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai Pedoman operasional dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Banjar. Renstra yang disusun berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021). Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dan rencana kinerja 5 tahunan.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

a. Kedudukan

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan, Perijinan Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu yang bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Fungsi

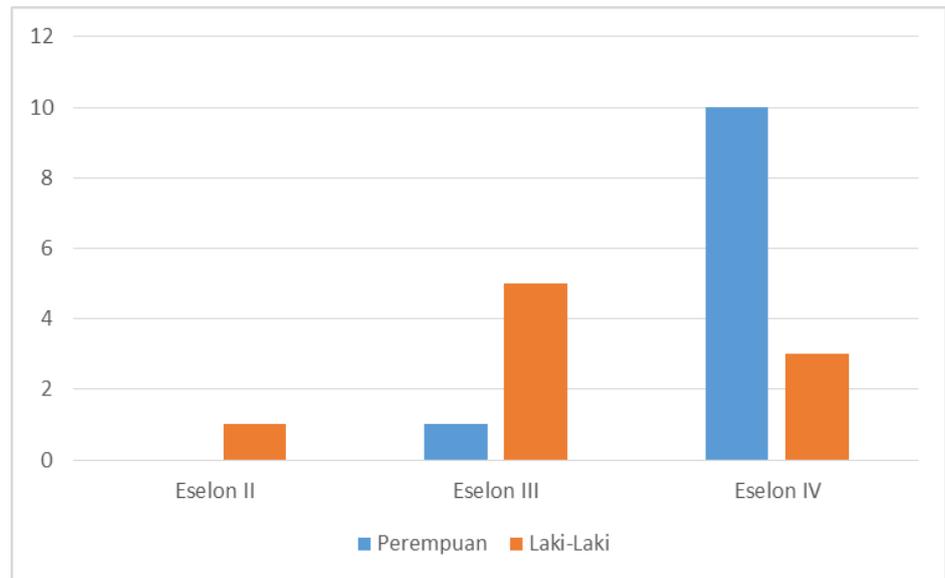
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati
- Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang penanaman modal
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN**1.3.1 KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASAR JABATAN****a. Pejabat struktural**

Pejabat struktural di DPMPTSP Kabupaten Banjar Eselon II terdiri dari 1 orang laki-laki, Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 5 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 10 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Hal ini menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Banjar pejabat structural didominasi oleh perempuan. Jumlah pejabat struktural di DPMPTSP Kab. Banjar dijelaskan pada Gambar 1. berikut:
Sumber : DPMPTSP Kab. Banjar.

Gambar 1. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan jenis Kelamin



b. Tenaga kontrak waktu tertentu

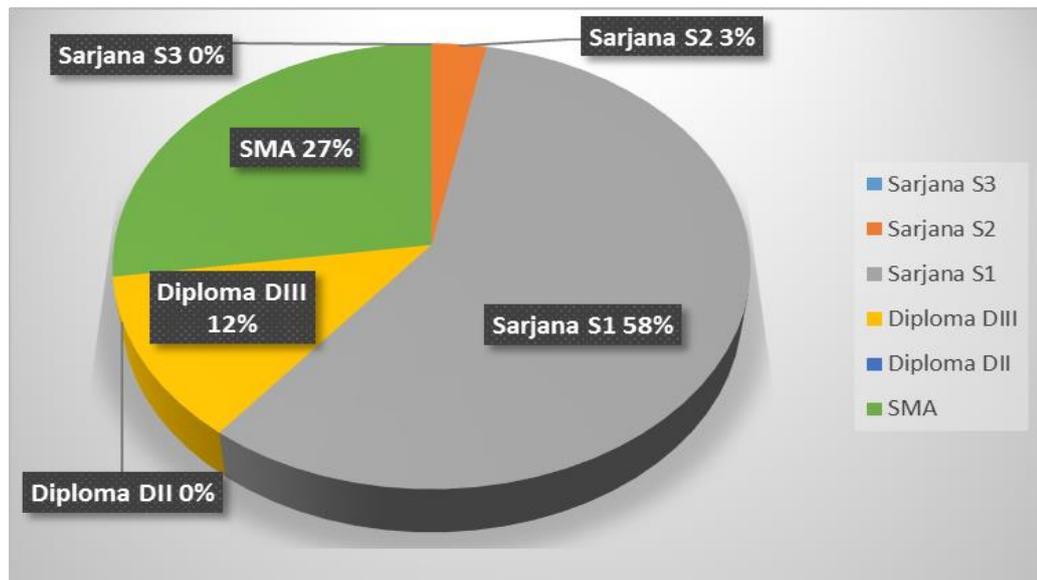
Selain pegawai yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPMPSTP di dukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu, tercatat sebanyak 39 orang dengan rincian 2 orang pertugas kebersihan, 2 orang keamanan, 2 orang Sopir dan 33 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya sistem aplikasi yang membantu proses pelayanan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta website informasi DPMPSTP.

I.3.2 KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASAR PENDIDIKAN

Tabel 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S3	0
2	Sarjana S2	1
3	Sarjana S1	19
4	Diploma DIII	4
5	Diploma DII	0
7	SMA	9
8	SMP	0
9	SD	0
	Total	39

KOMPOSISI PEGAWAI DPMPTSP BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN



Dari gambar tersebut diatas dapat terlihat bahwa kondisi pegawai DPMPTSP Kab. Banjar sebagian besar diisi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan S-1 (19 orang atau 58 %), kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 3 %, kualifikasi pendidikan DIII sebanyak 4 orang atau 12 % dan SMA sebanyak 9 orang atau 27 %. Kondisi pegawai dengan persentasi seperti tergambar diatas secara umum jika dilihat dari segi kualitas jumlah personil DPMPTSP Kab. Banjar sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

1.3.3. KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA

Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada posisi jabatan struktural DPMPTSP Kabupaten Banjar kebutuhan sebanyak 20 jabatan.
2. Pada setiap bidang dapat dijelaskan kondisi pegawai sebagai berikut :
 - Bidang Sekretariat memiliki 1 orang eselon III, 3 orang eselon IV, 5 orang staff dan 12 orang tenaga kontrak.
 - Bidang Penanaman Modal memiliki 1 orang eselon III, 2 orang eselon IV, 1 orang staff dan 2 orang tenaga kontrak.
 - Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal memiliki 1 orang eselon III, 2 orang eselon IV, 3 orang tenaga kontrak.

- Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan memiliki 1 orang eselon III, 2 orang eselon IV, 3 orang staff dan 6 orang tenaga kontrak.
- Bidang Perijinan Jasa Usaha memiliki 1 orang eselon III, 2 orang eselon IV, 2 orang staff dan 3 orang tenaga kontrak.
- Bidang Perijinan Tertentu memiliki 1 orang eselon III, 2 orang eselon IV, 1 orang staff dan 6 orang tenaga kontrak.

1.3.4 ASET SARANA DAN PRASARANA

Tabel 1.4
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Ruang Rapat	1	Baik
2	Mobil Delivery Van	1	Baik
3	Kendaraan roda 2	4	2 Kurang Baik, 2 Baik
4	Kendaraan Roda 4	5	Baik
5	AC 1 PK	2	Rusak Berat
6	AC 2 PK	4	Rusak Berat
7	AC Split	18	13 Baik, 5 Rusak Berat
8	Acces Point	2	Rusak Berat
9	Alat Pemadam Kebakaran	4	Baik
10	Alat Penghancur Kertas	5	4 Baik, 1 Rusak Berat
11	Almari	6	Rusak Berat
12	Antena penguat sinyal modem (Mobil pelayanan)	1	Rusak Berat
13	Bangku Tunggu	3	Baik
14	Baterai Aki/UPS	6	Rusak Berat
15	Brangkas	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
16	Camera Video	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
17	Catridge Canon Warna	20	20 Rusak Berat
18	Dispenser	2	Rusak Berat
19	Filling Besi/Metal (Kabinet)	11	6 Baik, 5 Kurang Baik
20	Flashdisk	17	Rusak Berat
21	Global Postioning System (GPS)	4	Baik
22	Handycam	1	Rusak Berat
23	Horden	2	1 Baik, 1 Rusak Berat

24	Hub	3	Baik
25	Hub 24 Port	2	Rusak Berat
26	Jam Dinding	2	Rusak Berat
27	Kabel Telepon	25	Rusak Berat
28	Kabel Telepon (Speedy)	50	Rusak Berat
29	Kabel UTP	6	Rusak Berat
30	Karpet	3	Baik
31	Karpet Lantai	15	Rusak Berat
32	Kembang, Taplak Meja	1	Rusak Berat
33	Keyboard	5	Rusak Berat
34	Keyboard Standar	10	Rusak Berat
35	Kipas Angin	4	Rusak Berat
36	Kipas Angin (Mobil Pelayanan)	1	Rusak Berat
37	Komputer All in One	1	Baik
38	Komputer P.C Unit	31	22 Baik, 4 Kurang Baik, 5 Rusak Berat
39	Komputer/Deskbook	1	Rusak Berat
40	Konektor RJ 45	4	Rusak Berat
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	82	55 Baik, 27 Kurang Baik
42	Kursi Besi / Metal (Ruang Tunggu CS)	3	Baik
43	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
44	Kursi kayu/Rotan/Bambu	1	Kurang Baik
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
46	Kursi Putar	6	Baik
47	Kursi Rapat	75	Baik
48	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
49	Kursi Tamu Ruang CS	5	Baik
50	Kursi Tangan	10	Rusak Berat
51	Lain-lain (Peralatan Jaringan Komputer)	1	Kurang Baik
52	lain-lain (Tandon)	2	Baik
53	lain-lain Alat Dapur (Dinner Set)	2	Kurang Baik
54	lain-lain Alat Kantor lainnya (home use) CCTV	2	Baik
55	Lain-lain alat kantor Lainnya (Mesin Laminating)	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
56	lain-lain Peralatan Jaringan (Acces point)	1	Baik
57	lain-lain Peralatan Jaringan (Pembuatan Website DPMPTSP)	1	Baik

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANJAR

58	Lain-lain Peralatan Jaringan Simda	1	Baik
59	Lain-lain Tugu Pembangunan (Bangunan Baleho)	6	Baik
60	Lain-lain.alat ukur Universal (range finder)	4	Baik
61	Lan card (Mobil pelayanan)	1	Rusak Berat
62	Laptop	23	19 Baik, 3 Kurang Baik, 1 Rusak Berat
63	LCD Proyektor	1	Baik
64	Lemari Arsip	5	Baik
65	Lemari Besi	9	Baik
66	Lemari Es	1	Baik
67	Lemari Kayu	25	22 Baik, 3 Rusak Berat
68	Lemari Makan	1	Baik
69	Meja Kayu/Rotan	10	Baik
70	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	52	10 Baik, 22 Kurang Baik, 20 Rusak Berat
71	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
72	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Baik
73	Meja Rapat	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
74	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
75	Meja Resepsionis (Pengaduan)	1	Baik
76	Meja Tamu Ruang CS	4	Baik
77	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik
78	Mesin Hitung / Kalkulator	2	Rusak Berat
79	Mesin Ketik	1	Rusak Berat
80	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	Baik
81	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Rusak Berat
82	Mesin Penghisap Debu	1	Baik
83	Mesin Perforasi	1	Baik
84	Modem	3	Baik
85	Monitor	4	Baik
86	Mouse	7	Rusak Berat
87	Mouse Standar	10	Rusak Berat
88	P.C. Unit	7	Kurang Baik
89	Papan Nama Instansi	1	Baik
90	Papan Nama Kantor (Neon Box)	1	Baik
91	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Baik
92	Portable Generating Set (Genset)	1	Kurang Baik

93	Printer	56	45 Baik, 9 Kurang Baik, 2 Rusak Berat
94	Rak buku/Tv/Kembang	2	Rusak Berat
95	Sofa	2	Rusak Berat
96	Sound System	1	Rusak Berat
97	Speaker	2	Rusak Berat
98	Stavolt (Mobil pelayanan)	1	Rusak Berat
99	UPS	2	Rusak Berat
100	UPS Flazer FL 600 WA	4	Rusak Berat
101	UPS/Stabilisator	4	Rusak Berat

Prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Banjar adalah sistem aplikasi berbasis website. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain:

- Aplikasi SIM Perijinan
- SMS Gateway
- Website
- Kalkulator Layanan
- Layanan Perijinan Keliling
- Serta inovasi baru DPMPTSP yaitu Arsip Elektronik dan Petasan

1.4 ASPEK STRAGTEGIS

DPMPTSP Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati
- Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang penanaman modal
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, dan

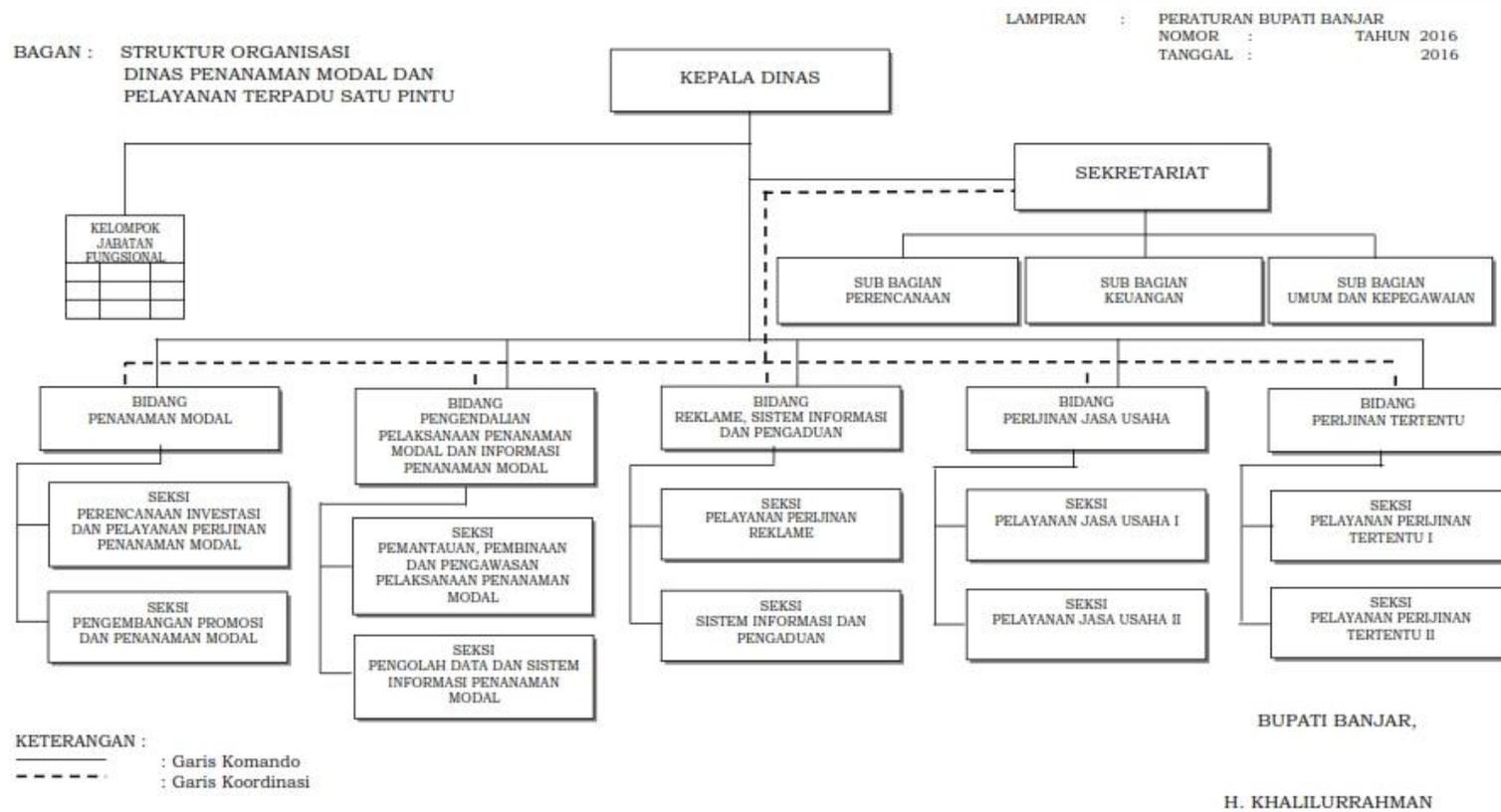
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DPMPSTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan, dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modal, dan
 - Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :
 - Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan
 - Seksi Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- e. Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan, terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Perijinan Reklame, dan
 - Seksi Sistem Informasi dan Pengaduan
- f. Bidang Perijinan Jasa Usaha, terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Jasa Usaha I, dan
 - Seksi Pelayanan Jasa Usaha II
- g. Bidang Perijinan Tertentu, terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu I, dan
 - Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu II
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI



1.5 KEUANGAN

Anggaran (belanja langsung dan tidak langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar.

Rincian anggaran yang dikelola oleh DPMPTSP adalah seperti dijelaskan pada tabel Tabel I-4. sebagai berikut

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBN	-	-
APBD	7.502.130.755,00	100

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana DPMPTSP Kabupaten Banjar mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi (struktur organisasi); Aspek Strategis dan permasalahan utama;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2017

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2017 dan Realisasi Anggaran Tahun 2017.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar melaksanakan program dan kegiatan.

2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJAR**Visi dan misi**

Selanjutnya didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Banjar adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih periode Tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”

Yang dijabarkan sebagaimana berikut :

- Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai
- Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Dengan penjelasan misi yaitu :

Misi 1

Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Misi 2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Misi 3

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik.

Misi 4

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Misi 5

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

2.1.2 TUJUAN DPMPTSP KABUPATEN BANJAR

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Meningkatkan investasi dan kerjasama swasta dan pemerintah daerah	persentasi pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang	Persentase penanganan pengaduan ttg layanan publik dibidang

	administrasi	perizinan yg telah ditindaklanjuti
3.	meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan

2.1.3 SASARAN DPMPTSP KABUPATEN BANJAR

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan investasi dan kerjasama swasta dan pemerintah daerah	Meningkatnya investasi daerah
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang administrasi	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntabel
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm yang prima	meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dalam tabel terlampir.

2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP KABUPATEN BANJAR

Tujuan dan sasaran strategis akan dicapai dan diawali dengan penentuan kebijakan-kebijakan untuk menjaga agar program dan kegiatan tidak keluar dari arah pencapaian tujuan dan sasaran. Dari kebijakan-kebijakan tersebut kemudian disusun program-program secara sekuensial setiap tahunnya. Dari program inilah nantinya akan dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan implementatif berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi adalah cara atau langkah langkah yang berisikan kebijakan dan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang akan diambil oleh SKPD dalam mencapai tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sumber sumber yang sudah terdata serta pengelolaan keuangan daerah nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Banjar, oleh karenanya seluruh kebijakan baik mengenai pendapatan daerah maupun belanja diarahkan untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas.

Tabel 2.3

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan

No	Strategi	Kebijakan
1.	Mengikuti kegiatan diklat yang disediakan oleh lembaga yang berkompeten	Mengikuti Diklat yang sesuai dengan kebutuhan
2.	Menyediakan anggaran operasional penyusunan laporan keuangan	Menyediakan pelayanan administrasi / ketata usahaan secara profesional untuk mendukung lancarnya seluruh kegiatan kantor
3.	Menyediakan anggaran rutin untuk menunjang kegiatan kantor	Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana
4.	Menyusun dan membuat buku Standar Pelayanan Publik, dan buku-buku peraturan lainnya	Membuat dan memperbaiki, menghimpun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan peraturan lainnya
5.	Mengikuti pelatihan pemeliharaan penerapan manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan melaksanakan audit eksternal terhadap peneraannya setiap tahun	Membuat dan Menerapkan, standar mutu kegiatan kantor sesuai ISO 9001:2008 dan audit pelaksanaannya
6.	Menyediakan anggaran dan sarana untuk mempermudah pengukuran IKM	Menyelenggarakan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPSTP
7.	Melakukan update terhadap penerapan teknologi yang ada sesuai perkembangan	Membuat dan mengembangkans SIM Pelayanan Perijinan berbasis TI
8.	Membentuk unit khusus	Membuat dan menerapkan Standar

No	Strategi	Kebijakan
	penanganan pengaduan masyarakat dan standar penanganan pengaduan masyarakat, serta menyediakan instrumen yang diperlukan	Operational Procedure penanganan dan instrumen pengaduan/aspirasi masyarakat
9.	Melaksanakan sosialisasi tentang perizinan di Kecamatan-Kecamatan dan mengikuti pameran	Melakukan sosialisasi pelayanan perijinan pada DPMPTSP
10.	Melakukan pemetaan objek perizinan dan operasi sisir	Melakukan intenifikasi/ ekstensifikasi penerimaan PAD sektor perijinan dan pengawasan perijinan

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Kabupaten Banjar merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			(%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Sumber daya Manusia BKPMPT	Terbentuknya Kompetensi Sumber Daya Manusia BKPMPT melalui Pendidikan dan Pelajaran berkelanjutan	100%
		Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan BKPMPT	100%
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Sarana Prasarana Pelayanan Perijinan	Tersedianya layanan administrasi/ ketatausahaan yang memadai	100%
		Tersedianya Sarana prasarana yang memadai dan siap pakai	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			(%)
1	2	3	4
3	Meningkatnya kecepatan, kemudahan dan kepastian dan kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan perijinan	Terlaksananya system dan prosedur kegiatan kegiatan kantor sesuai standar Mutu ISO 90001:2008	100%
		Tersedianya system informasi dan manajemen pelayanan berbasis TI	100%
		Tersedianya Mekanisme dan sarana penyampaian aspirasi dan penanganan pengaduan masyarakat	100%
4	Meningkatnya Aksesibilitas dan peran serta masyarakat dalam proses pelayanan perijinan	Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap proses perijinan dan pentingnya perijinan bagi iklim usaha yang sehat	100%
5	Meningkatnya Iklim Usaha di Kabupaten Banjar	Terpenuhinya target penerimaan PAD	100%

2.3 PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Kabupaten Banjar merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

DPMPTSP Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Perubahan Anggaran Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi (Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN?PMA)	Rp.1.189.345.000	100%
2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan public di bidang perizinan yang telah ditindaklanjuti	Rp. 100.060.000	100%
3	Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai IKM	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	Rp.489.915.120	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.808.754.635,-
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 481.800.000,-
3	Program Peningkatana Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 150.000.000,-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 26.150.000,-
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 319.320.000,-
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 695.545.000,-
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 174.480.000,-
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 302.415.120,-
9	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 100.060.000,-
10	Program Penunjang Pemerintah dan Pembangunan	Rp. 187.500.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab II mengenai Rencana Kinerja Tahun 2017.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup ; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

DPMPTSP Kab. Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja DPMPTSP Kab. Banjar tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kab. Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut.

Tabel 3.2
 Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2017 (sajikan dalam Layout : Landscape)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Nasional (SPM / ...) <u>jika ada</u>	Capaian Tahun (2016)	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (Realisasi Tahun n / Target akhir jangka menengah)
					Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 / 9
1.	Meningkatnya investasi daerah	persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)	-	119%	84%	142,5%	169.64%	88.5%	161.58%
2.	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntable	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANJAR

3.	meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	-	80,34	81.7	83.09	101.70	82.2	101.08
----	--	--	---	-------	------	-------	--------	------	--------

1. *Penjelasan secara umum, jumlah sasaran dan indikator*

a. Meningkatnya Investasi Daerah

Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yaitu persentase pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) hingga saat ini terealisasi sebesar Rp. 3,752,664,596,570 atau 143 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 84%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 nilai Realisasi Investasinya sebesar Rp. 1.547.450.102.887 hal ini disebabkan karena banyak sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kab Banjar terhadap para investor sehingga meningkatkan kesadaran investor/masyarakat tentang pentingnya berinvestasi di Kabupaten Banjar, selain itu semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD terkait guna memudahkan dan melancarkan dalam pemrosesan perizinan. Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas menjadi salah satu berhasilnya investasi di Kabupaten Banjar sehingga mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Selain itu masih banyak penyebab meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Banjar yaitu tingkat keamanan usaha yang cukup tinggi dan keadaan yang kondusif juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah investasi, banyaknya kemudahan yang diberikan DPMPTSP Kab. Banjar kepada para investor guna mempermudah pelayanan perizinan, kepastian hukum, regulasi yang jelas dan sumber daya alam yang melimpah dan yang masih tersedia terutama dibidang Kelapa Sawit, Properti dan karet bahkan di bidang perdagangan dan perumahan juga menjadi daya tarik bagi investor.

b. Terwujudnya Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Yang Efisien, Efektif, Dan Akuntabel

Dalam rangka mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat maka di bentuklah Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada BKPMPPT Kabupaten Banjar, Unit ini bertugas mulai dari penerimaan pengaduan sampai pada memfasilitasi penanganan/pemecahan permasalahan yang di

hadapi dengan target adanya respon terhadap pengaduan tersebut maksimal 10 hari kerja.

Di dalam Kegiatan pengaduan masyarakat, disini di buat tim khusus sehingga kalau ada pengaduan dari masyarakat dapat segera di atasi. Dan Kegiatan ini menunjukkan bahwa target RPJM pada IKU telah tercapai.

Dapat dilihat dari tabel berikut ini, IKU dan target RPJM dengan perbandingan tahun 2012 - 2017 sbb :

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengaduan masyarakat tentang layanan public bidang perizinan yang telah ditindaklanjuti	7	8	8	8	0	2
Penyelesaian pengaduan masyarakat	3	4	6	8	0	2
PERSENTASE	42%	50%	100%	100%	100%	100%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa target pengaduan dari masyarakat tercapai 100%. Tidak ada pengaduan yang tidak tertangani berarti tidak ada masalah di dalam pelayanan perizinan yang mana di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya masih ada pengaduan tetapi dalam pengaduan tersebut dapat di selesaikan dengan baik.

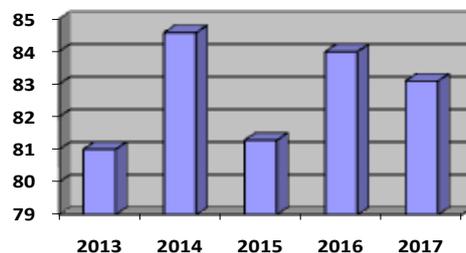
Untuk Tahun 2017 di dalam kegiatan ini masih di lakukan monitoring kelapangan walaupun tidak ada pengaduan, yang mana DPMPSTP kabupaten Banjar tetap selalu memantau baik dari segi masyarakatnya maupun pembangunannya. Peningkatan Kualitas SDM dalam penanganan Pengaduan dan Pelayanan Perizinan menjadi salah satu penyebab tertanganinya pengaduan yang masuk untuk tahun 2017 ini.

c. Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nilai Ikm

Kegiatan IKM dapat dilaksanakan sesuai target yaitu 1 tahun dengan menggunakan Aplikasi Penilaian IKM yang dibuat staf DPMPSTP Banjar, Nilai IKM yang di diperoleh DPMPSTP Banjar Tahun 2017 ini adalah 83,09 atau dalam kategori **sangat baik** dengan nilai katagori mutu pelayanan **A**.

Harapan kedepannya adalah dimungkinkannya penganggaran atau honorarium untuk petugas IKM yang bekerja melakukan wawancara, pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada pembuatan laporan, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja mereka, yang ada gilirannya dapat menghasilkan data IKM yang lebi baik lagi. Rekapitulasi hasil penilaian IKM dapat dilihat pada lampiran.

Nilai di atas jika dikonversikan dengan rumus yang di ditetapkan menjadi 83,09 / A / sangat baik.



Tahun 2013 : 81

Tahun 2014 : 84,57

Tahun 2015 : 81,28

Tahun 2016 :83.99

Tahun 2017 : 83.09

Grafik di atas adalah nilai IKM selama 5 tahun terakhir

IKM ini salah satu kegiatan yang termasuk di dalam target RPJM, yang mana setiap tahunnya IKM meningkat nilainya, untuk tahun ini terjadi perubahan nilai di sebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Terjadinya perubahan peraturan dari MANPAN Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoma SKM yang mana dari IKM menjadi SKM.
2. Selain itu juga perubahan unsur penilaian pelayanan yang dulu ada 14 unsur menjadi 9 unsur.

3. Jumlah responden yang ditentukan oleh provensi sebanyak minimal 150 responden sedangkan dalam rumus yang digunakan seharusnya minimal 100 responden, meski demikian tetap mengikuti acuan provensi Kal-Sel.
4. Nilai indek IKM tahun 2017 tidak mengurangi nilai kepuasan masyarakat untuk IKM yang mana masih katagori Sangat Baik.

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

2.1 SASARAN (1)

a. Meningkatnya investasi daerah

- Indikator persentasi pertumbuhan investasi (kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)

Meningkatnya investasi daerah disini dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi pertumbuhan investasi yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan untuk meningkatkan investasi daerah DPMPTSP melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi, DPMPTSP juga melakukan rapat atau pertemuan rutin setiap bulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan koordinasi selain itu cek lapangan juga rutin dilakukan bersama SKPD terkait guna memonitoring dan mengontrol semua kelengkapan perizinan sesuai dengan regulasi yang ada. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah perusahaan daerah, perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri yang beroperasi di Kabupaten Banjar.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penanaman modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan melalui penyederhanaan prosedur investasi dan desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal.

Otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerah, baik melalui pengembangan komoditas dan potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya terus menciptakan iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung

kegiatan investasi di Kabupaten Banjar, seperti penyederhanaan prosedur investasi, transparansi dan kepastian hukum serta perbaikan sarana dan prasarana fasilitas penunjang investasi.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk dapat mengidentifikasi potensi investasi melalui kegiatan identifikasi potensi investasi ke Kecamatan-kecamatan yang dianggap memiliki potensi investasi untuk dikembangkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, DPMPTSP Kab. Banjar melakukan expose dan monitoring setiap bulannya dan mendatangkan berbagai narasumber dari provinsi dan BKPM pusat, kegiatan tersebut dimaksud dapat memberikan informasi dan gambaran yang menyeluruh tentang potensi beberapa faktor strategis di Kabupaten Banjar serta peluang pengembangan investasinya. yang dapat dijadikan referensi baik bagi Pemerintah Daerah untuk memajukan dan mengembangkan potensi investasi/komoditas unggulan dan untuk para investor sebagai informasi awal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banjar.

1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a) Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi, DPMPTSP melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi, DPMPTSP juga melakukan rapat atau pertemuan rutin setiap bulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan koordinasi selain itu cek lapangan juga rutin dilakukan bersama skpd terkait guna memonitoring dan mengontrol semua kelengkapan perizinan sesuai dengan regulasi yang ada. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah perusahaan daerah, perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri yang beroperasi di Kabupaten Banjar.

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 36.250.000 dan terealisasi sebesar Rp. 35.965.290 atau sebesar 99,21%

b) Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan agar menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar salah satunya melakukan pencetakan brosur yang berguna untuk memudahkan para calon investor untuk mengetahui persyaratan yang ada, dengan cara meningkatkan Sumber daya manusia yang ada di DPMPTSP dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang ada. Selain itu kegiatan ini juga mengkoordinasikan semua bidang terkait dalam peningkatan pelayanan perizinan termasuk perjalanan dinas guna menambah wawasan para sumber daya manusia DPMPTSP.

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 598.245.000 dan terealisasi sebesar Rp. 296.502.360 atau sebesar 99,71%

c) Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penanaman modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan melalui penyederhanaan prosedur investasi dan desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal.

Otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerah, baik melalui pengembangan komoditas dan potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya terus menciptakan iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung kegiatan investasi di Kabupaten Banjar, seperti penyederhanaan prosedur investasi, transparansi dan kepastian hukum serta perbaikan sarana dan prasarana fasilitas penunjang investasi.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk dapat mengidentifikasi potensi investasi melalui kegiatan identifikasi

potensi investasi ke Kecamatan-kecamatan yang dianggap memiliki potensi investasi untuk dikembangkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, DPMPTSP Kab. Banjar melakukan expose dan monitoring setiap bulannya dan mendatangkan berbagai narasumber dari provinsi dan BKPM pusat, kegiatan tersebut dimaksud dapat memberikan informasi dan gambaran yang menyeluruh tentang potensi beberapa faktor strategis di Kabupaten Banjar serta peluang pengembangan investasinya. yang dapat dijadikan referensi baik bagi Pemerintah Daerah untuk memajukan dan mengembangkan potensi investasi/komoditas unggulan dan untuk para investor sebagai informasi awal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banjar.

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 56.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 55.994.778 atau sebesar 99,90%

2) Program Peningkat dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Di Kegiatan ini DPMPTSP Kab. Banjar membentuk tim Penerbitan Pengawasan media reklame dan Tim Pendataan Potensi Reklame serta bekerja sama dengan SKPD terkait guna melaksanakan pengawasan dan pengendalian reklame di Kabupaten Banjar dan juga kegiatan ini mengangkut konsultasi dan peningkatan wawasan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan ini juga merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi reklame.

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 162.980.000 dan terealisasi sebesar Rp. 162.964.100 atau sebesar 99,99%

3) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dalam kegiatan ini DPMPTSP membentuk tim pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya memonitor berbagai kegiatan investasi di Kabupaten Banjar. Hasil dari kegiatan tim tersebut ketataan investor dalam pentingnya izin dalam berinvestasi di Kabupaten Banjar meningkat, dengan adanya kegiatan ini para investor lebih mengerti tentang hak dan kewajibannya, dan investor dapat mengetahui peluang usaha dari hasil pembinaan dari tim yang telah dibentuk.

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 59.320.000 dan terealisasi sebesar Rp. 59.320.000 atau sebesar 100%

b) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Di Kegiatan ini diadakan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di DPMPTSP Kab. Banjar, selain itu juga dapat menambah wawasan terutama dalam hal penanam modal karena Bimbingan Teknis yang diikuti dipilih sesuai dengan bimbingan teknis yang diperlukan dan diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 110.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 108.707.440 atau sebesar 98,82%

c) Penyelenggaraan Pameran Investasi

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar adalah dengan menarik minat investor dari dalam dan luar negeri untuk membeli produk unggulan serta berinvestasi di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banjar senantiasa mengikuti berbagai kegiatan pameran dengan skala lokal dan nasional bahkan internasional yang dapat menjadi sarana informasi dan promosi potensi sumber daya

alam dan produk kreatifitas industri daerah yang difasilitasi melalui kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 149.460.550 atau sebesar 99,64%

Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2017 (Sasaran ke-1)

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (2016)	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	3	5	6	7	8	9	10
1.	Persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)	119%	84%	142,5%	169.64%	88.5%	161.58%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yaitu persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) hingga saat ini terealisasi sebesar Rp. 3,752,664,596,570 atau 142,5% melebihi target yang ditetapkan yaitu 84%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 nilai Realisasi Investasinya sebesar Rp. 1.547.450.102.887. Realisasi tersebut didapat dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Realisasi Investasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2017} - \text{Realisasi Tahun 2016}}{\text{Realisasi Tahun 2016}} \times 100\%$$

- a. Permasalahan yang kadang muncul dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran dan Antusias pelaku usaha untuk datang menghadiri sosialisasi yang diberkan oLeh DPMPTSP, dari 200 undangan yang disebar

hanya 50% yang berhadir dan mengikuti sosialisasi karena dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau investor tentang pentingnya mendaftarkan izin bagi perusahaan mereka yang tentunya akan berimbas pada kenaikan nilai investasi di Kabupaten Banjar.

- b. Solusi untuk permasalahan diatas, Pihak DPMPTSP akan memberikan undangan bukan hanya diberikan secara tertulis, kami juga akan memberikan undangan secara lisan dan langsung mengajak kepada para pelaku usaha tentang manfaat yang akan didapat dari sosialisasi tersebut.

2.2 SASARAN (2)

- b. Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntable**

- Indikator Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti**

Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntable disini adalah Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti di dalam kegiatan ini dibentuk tim pelaksana penanganan pengaduan yang bertugas menyelesaikan semua bentuk pengaduan yang masuk di DPMPTSP Kab. Banjar beserta dengan semua peralatan pendukungnya. Pengaduan yang masuk Ke DPMPTSP berupa laporan melalui Pos Pengaduan yang telah tersedia. Berikut mekanisme penanganan pengaduan masyarakat :

- Pengguna jasa menyampaikan pengaduan
- Petugas mengentry data pengaduan, memberikan resi ke pengguna jasa
- Menerima penyebab
- Menetapkan tindakan
- Memberikan informasi kepada pengguna jasa
- Melakukan tindakan dan verifikasi
- Pengguna jasa menyampaikan pernyataan puas/tidak puas

1) Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

a) Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Di dalam kegiatan ini dibentuk tim pelaksana penanganan pengaduan yang bertugas menyelesaikan semua bentuk pengaduan yang masuk di DPMPSTSP Kab. Banjar beserta dengan semua peralatan pendukungnya. Pengaduan yang masuk Ke DPMPSTSP berupa laporan melalui Pos Pengaduanyang telah tersedia. Berikut mekanisme penanganan pengaduan masyarakat :

- Pengguna jasa menyampaikan pengaduan
- Petugas mengentry data pengaduan, memberikan resi ke pengguna jasa
- Menerima penyebab
- Menetapkan tindakan
- Memberikan informasi kepada pengguna jasa
- Melakukan tindakan dan verifikasi
- Pengguna jasa menyampaikan pernyataan puas/tidak puas

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 100.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 96.260.000 atau sebesar 96,20%

Tabel 3.3.2

Capaian Kinerja DPMPSTSP Tahun 2017 (Sasaran ke-2)

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (2016)	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	3	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yaitu Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti hingga saat ini terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Ada 2 pengaduan yang masuk untuk tahun 2017 dan telah terselesaikan. Realisasi tersebut didapat dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Realisasi Pengaduan Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan perizinan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan perizinan}} \times 100\%$$

- a. Permasalahan yang kadang muncul dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengaduan yang dimaksud, kebanyakan pola pikir masyarakat menganggap pengaduan yang kami tangani adalah mencakup tentang semua aspek, padahal seharusnya pengaduan yang kami tangani adalah tentang perizinan dan Non Perizinan dan Permasalahan berikutnya adalah masih kurangnya minat masyarakat untuk mengadukan masalah tentang layanan Perizinan dan Non Perizinan.
- b. Solusi untuk permasalahan diatas, Pihak DPMPTSP akan memberikan Penjelasan kepada masyarakat yang ingin mengajukan aduan tentang proses,alur, mekanisme dan wewenang dari DPMPTSP akan lebih baik jika kami dapat melakukan sosialisasi terkait pelayanan pengaduan masyarakat tersebut.

2.2 SASARAN (3)

- c. **Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai IKM**

- **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan**

Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai IKM adalah Nilai dari IKM (Indeks Pelayanan Perizinan) Pelayanan Perizinan atau nilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP terhadap pemohon. Semakin

tinggi nilai yang didapatkan maka semakin bagus pelayanan yang diberikan DPMPTSP, sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat semakin buruk pula pelayanan yang diberikan.

Kegiatan IKM dapat dilaksanakan sesuai target yaitu 1 tahun dengan menggunakan Aplikasi Penilaian IKM yang dibuat staf DPMPTSP Banjar, Nilai IKM yang di peroleh DPMPTSP Banjar Tahun 2017 ini adalah 83,09 atau dalam kategori sangat baik dengan nilai katagori mutu pelayanan A.

1) Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

a) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan DPMPTSP Kab. Banjar mengadakan pameran tingkat kabupaten dan nasional yang bertujuan untuk mengenalkan segala bentuk perizinan kepada masyarakat, selain itu pembuatan dokumen dan laporan optimalisasi pemanfaatan informasi dan teknologi dalam bidang perizinan dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa kuesioner yang diberikan dengan mengacu dari beberapa unsur pelayanan yang langsung diisi oleh para masyarakat. Berikut unsur pelayanan secara global :

- Kemudahan persyaratan pelayanan
- Kemudahan prosedur pelayanan
- Kecepatan waktu pelayanan
- Kejelasan, kewajaran dan kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan
- Kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- Kompetensi petugas pelayanan
- Perilaku petugas pelayanan
- Kesesuaian maklumat pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Kesesuaian dan kemampuan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 157.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 156.837.250 atau sebesar 99,58%

2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Salah satu upaya peningkatan pelayanan DPMPSTSP Kab. Banjar dengan memberikan berbagai inovasi terbaru dalam pelayanan salah satunya SMS Gateway yang memudahkan Pemohon untuk mengetahui keadaan berkas izin yang didaftarkan secara auto reply disetiap tahapan proses izin. Selain itu penyediaan sistem informasi pendukung pelayanan yang berbasis Teknik Informasi baik berupa aplikasi maupun website, dengan adanya website dan aplikasi perizinan ini dapat mempermudah dalam pemrosesan perizinan.

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 320.415.120 dan terealisasi sebesar Rp. 312.537.290 atau sebesar 97,54%

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja DPMPSTSP Tahun 2017 (Sasaran ke-3)

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (2016)	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	3	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	80,34	81.7	83.09	101.70	82.2	101.08

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan hingga saat ini terealisasi sebesar 83.09 melebihi

target yang ditetapkan yaitu 81.70. Realisasi tersebut didapat dari buku IKM yang dibuat setiap tahunnya.

- a. Permasalahan yang kadang muncul dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kurangnya peran aktif dari masyarakat terkait pengisian survey kepuasan masyarakat sendiri, hal ini dimungkinkan karena kurangnya minat dari pemohon untuk mengisi survey tersebut.
- b. Solusi untuk permasalahan diatas, Pihak DPMPTSP akan lebih giat lagi dalam memberikan survey dengan cara yang lebih baik.

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola DPMPTSP Kabupaten Banjar tahun 2017 adalah sebesar Rp 7.502.130.755,- (100%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 3.250.106.000 (43,32 % dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 4.252.024.755,- (56,68 % dari total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk progam utama sebesar Rp 1.734.549.058,- (99,07% dari total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp 1.750.820.120,-) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung progam pendukung sebesar Rp 2.458.064.624,- (97,50% dari total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 2.521.204.635,- dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.250.106.000,- (100% dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 3.250.106.000,-).

Tabel 3.4.1

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Saaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
			(%)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya investasi daerah	persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)	84	143	169.64	1.172.845.000	1.168.914.518	99,66

2.	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	100	100	100	100.060.000	96.260.000	96,20
3.	meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	81.7	83.09	101.70	477.915.120	469.374.540	98,21
TOTAL BELANJA LANGSUNG						4.252.024.755	4.192.613.682	98,60
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG						2.521.204.635	2.458.064.624	97,50
BELANJA TIDAK LANGSUNG						3.250.106.000	3.250.106.000	100

ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 3 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 3 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1, telah mencapai kinerja sebanyak 169,64% dan dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99,66% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran 2, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, dan dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 96,20%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah

satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4.2
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Saaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya investasi daerah	Persentasi pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)	169.64	99.66	170.21
2.	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntable	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	100	96.20	103.95
3.	Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	101.70	98.21	103.55

3.1 TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

3.1.1. EVALUASI KINERJA TAHUN (2017)

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja DPMPSTP Banjar Tahun 2017 memperoleh nilai 63,06 dengan interpretasi predikat Baik (B). maka pada tahun 2018 direkomendasikan kepada Kepala DPMPSTP Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Merumuskan indikator kinerja tujuan pada Renstra yang berorientasi hasil;
2. Menyusun tujuan/sasaran dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja agar relevan/selaras dengan IKU yang sudah diformalkan;
3. Merumuskan indikator kinerja sasaran dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) yang memenuhi indikator yang berorientasi hasil;
4. Menyusun LKJiP yang lebih lengkap dengan menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan menyajikan informasi pencapaian sasaran.

3.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat DPMPSTP Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Merumuskan indikator kinerja tujuan pada Renstra yang berorientasi hasil;
2. DPMPSTP akan Menyusun LKJiP dengan menyajikan IKU lebih lengkap agar lebih baik;
3. Penyusunan LKJiP akan dibuat lebih terarah dan sesuai dengan pencapaian IKU;
4. DPMPSTP akan Menyusun tujuan/sasaran dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja agar relevan/selaras dengan IKU yang sudah diformalkan;
5. DPMPSTP akan Merumuskan indikator kinerja sasaran dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) yang memenuhi indikator yang berorientasi hasil.

BAB IV PENUTUP**1. KESIMPULAN**

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Meningkatnya investasi daerah dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi pertumbuhan investasi yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yang diperoleh yaitu persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) hingga saat ini terealisasi sebesar Rp. 3,752,664,596,570 atau 142,5% melebihi target yang ditetapkan yaitu 84%.
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntabel disini adalah Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti. Persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yang diperoleh yaitu Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti hingga saat ini terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Ada 2 pengaduan yang masuk untuk tahun 2017 dan telah terselesaikan.
3. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai IKM adalah Nilai dari IKM (Indeks Pelayanan Perizinan) Pelayanan Perizinan atau nilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP terhadap pemohon. Capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yang diperoleh yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan hingga saat ini terealisasi sebesar 83.09 melebihi target yang ditetapkan yaitu 81.70.

1. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri sosialisasi karena dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau investor tentang pentingnya mendaftarkan izin

bagi perusahaan mereka yang tentunya akan berimbas pada kenaikan nilai investasi. Solusi dari masalah ini yaitu akan memberikan undangan bukan hanya diberikan secara tertulis, kami juga akan memberikan undangan secara lisan dan langsung mengajak kepada para pelaku usaha tentang manfaat yang akan didapat dari sosialisasi tersebut.

2. Solusi untuk permasalahan pola pikir masyarakat menganggap pengaduan yang kami tangani adalah mencakup tentang semua aspek dan kurangnya minat masyarakat untuk mengadukan masalah tentang layanan Perizinan dan Non Perizinan , Pihak DPMPTSP akan memberikan Penjelasan kepada masyarakat yang ingin mengajukan aduan tentang proses,alur, mekanisme dan wewenang dari DPMPTSP akan lebih baik jika kami dapat melakukan sosialisasi terkait pelayanan pengaduan masyarakat tersebut.

Laporan Kinerja DPMPTSP Banjar tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Martapura, Januari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banjar

Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM
NIP. 19660318 198602 1 004

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 DPMPSTSP dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang dibebankan.

Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Martapura, Januari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banjar

Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM
NIP. 19660318 198602 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar Tahun 2017 disusun dengan tujuan menyajikan tentang gambaran capaian kinerja DPMPTSP, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian kinerja yang dibandingkan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut hasilnya.

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.